

DETERMINAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DALAM SEWINDU DANA DESA

Nurhidayati¹

Politeknik Keuangan Negara STAN¹

¹Corresponding author: nurhidayati@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 07/05/2023

Revisi pertama tanggal: 29/05/2023

Diterima tanggal: 04/06/2023

Tersedia online tanggal: 27/06/2023

ABSTRAK

Dana Desa telah digunakan antara lain untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan juga untuk meningkatkan pelayanan aparatur desa. Ruang lingkup penelitian ini adalah masyarakat desa di Jawa Timur, yang merupakan provinsi yang memperoleh Dana Desa paling besar dalam kurun waktu terakhir, tetapi angka kemiskinan absolut di Jawa Timur merupakan yang tertinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur di desa, pelayanan desa kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil kuisioner valid diperoleh dari 291 responden yang dianalisis menggunakan model struktural. Penelitian ini membuktikan bahwa pembangunan desa, pelayanan kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi variabel pelayanan desa memberikan pengaruh paling kecil dibandingkan dengan variabel yang lain. Aspek pelayanan kepada masyarakat yang mengacu kepada konsep good governance masih sangat perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat, melalui pemberian pelayanan secara akuntabel dan transparan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: infrastruktur, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan

ABSTRACT

Village Funds have been used, among others, for village infrastructure development activities, community empowerment activities, and also to improve village apparatus services. The scope of this research is the village community in East Java, which is the province that has received the most Village Funds in recent times, but the absolute poverty rate in East Java is the highest in Indonesia. This study aims to analyze the effect of infrastructure development in the village, village services to the community, and community empowerment on community welfare. Valid questionnaire results were obtained from 291 respondents who were analyzed using a structural model. This study proves that village development, community service, and community empowerment affect community welfare. However, the village service variable has the least influence compared to the other variables. The aspect of service to the community which refers to the concept of good governance still really needs to be improved for the welfare of the community, through the provision of services in an accountable and transparent manner and taking into account the needs of the community.

Keywords: infrastructure, service, community empowerment, welfare

1. Pendahuluan

Program Dana Desa lahir dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Dana Desa ini adalah wujud komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis (Republik Indonesia, 2014). Setelah berjalan selama 8 (delapan) tahun, Dana Desa ini diharapkan dapat menunjukkan perubahan kualitas hidup masyarakat desa. Mengiringi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga dikucurkan untuk pembangunan Desa. Dana Desa maupun ADD telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan fisik atau infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia (Damayanti, 2022; Daud et al., 2022; Firmansyah et al., 2020; Kurniawan, 2021; Nadia, 2021; Ngera et al., 2021; Tangkumahat et al., 2017; Tobing et al., 2021).

Selain berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur, Dana Desa dalam beberapa penelitian membuktikan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik di desa (Ferdinandus, 2019; Halim & Aras, 2016; Iryani, 2022; Suwaji & Suharmiyati, 2020; Yanti, 2021). Dana Desa selain diperuntukkan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur, juga dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan Dana Desa ini, kegiatan pemberdayaan masyarakat semakin meluas di berbagai wilayah di Indonesia dengan dampak yang signifikan (Agustina, 2022; Annisa, 2021; Ardiansyah et al., 2022; Bili & Ra'is, 2017; Fathony et al., 2019; Luju et al., 2020; Mendrofa, 2021; Perangin-Angin, 2017; Ramadhani et al., 2019; Ramaza, 2022).

Banyak penelitian yang mengaitkan langsung peran Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat (Haerunnisa, 2022; 'Izazi, 2023; Laila, 2021; Nasution et al., 2022; Nuwa et al., 2023). Padahal kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat itu tidak serta merta langsung terwujud begitu saja dengan adanya Dana Desa. Kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor. Menurut Cahyat et al. (2007), kesejahteraan dipantau dengan 3 (tiga) kondisi, yaitu kesejahteraan subjektif, kesejahteraan inti, dan lingkungan pendukung. Kesejahteraan subjektif menggambarkan perasaan bahagia, perasaan diakui, dipedulikan, dan sejenisnya. Kesejahteraan inti merupakan terpenuhinya kebutuhan dasar baik material maupun bukan material, yang mencakup aspek gizi, kesehatan, materi, maupun pengetahuan. Selanjutnya lingkungan pendukung yang berupa lingkungan alam, masyarakat, dan pemerintah juga turut mempengaruhi jenis kesejahteraan subjektif maupun inti. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak mengkaji pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan akuntabilitas desa, akan tetapi jarang yang mengaitkan antara keluaran dari Dana Desa tersebut dengan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan utama pembangunan desa. Penelitian ini berkontribusi dengan menggunakan ukuran kesejahteraan secara lebih komprehensif, tidak hanya pada ukuran material, tapi juga termasuk aspek kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman.

Penelitian ini mengkaji apakah ketiga tujuan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang berupa peningkatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa, serta peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa yang merupakan tujuan akhir dari

pembangunan nasional. Provinsi Jawa Timur dengan 29 Kabupaten dan 8.501 Desa adalah penerima Dana Desa terbesar pada tahun anggaran 2022. Pada tahun anggaran 2022, total Dana Desa Provinsi Jawa Timur sebesar Rp8,646 trilyun. Angka ini pada tahun 2021 adalah sebesar Rp7,659 trilyun yang dialokasikan kepada 7.721 desa di Jawa Timur. Pada tahun 2020, total Dana Desa Jawa Timur sebesar Rp7,65 trilyun. Secara nominal, angka Dana Desa Provinsi Jawa Timur terus meningkat. Indeks kedalaman kemiskinan perdesaan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan perdesaan ini di angka 2.5 (semester I) dan 2.69 (semester II). Pada tahun 2021 angka ini turun menjadi 2.48 (semester I) dan 2.16 (semester II). Akan tetapi jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Jawa Timur menduduki peringkat pertama untuk angka kemiskinan absolut di Indonesia. Kemiskinan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling bertolak belakang dimana jika kemiskinan menurun kesejahteraan akan meningkat (Marfuah, 2000). Dengan kemiskinan absolut yang tinggi dan dengan dana desa yang tinggi pula, harapannya dana desa ini dapat menurunkan angka kemiskinan dan pada akhirnya membawa kesejahteraan masyarakat desa Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur di desa, pelayanan desa kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada *good governance*, dengan pemberian pelayanan secara akuntabel dan transparan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.

2. Kerangka Teoretis dan Pengembangan Hipotesis

Dalam masyarakat miskin, kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan untuk mengonsumsi barang dan kesejahteraan sosial cenderung dianggap sebagai distribusi *equality* (Deaton, 1980). Menurut Ravallion (2016), konsep kesejahteraan individu merupakan landasan sebagian besar ukuran kemiskinan dan ketimpangan. Selain itu, kesejahteraan juga dipandang sebagai suatu persepsi individu atau aspek perilaku mengenai pilihan seseorang. Secara lebih spesifik Ravallion (2016) menyatakan bahwa memiliki gizi baik termasuk ke dalam ukuran kesejahteraan.

Infrastruktur memiliki klasifikasi yang bervariasi. Menurut Biehl (1991) infrastruktur dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu tipe jaringan (seperti jalan, saluran air, dsb) dan tipe point (seperti gedung sekolah, bangunan fasilitas kesehatan, dll). Jimenez (1994) mengklasifikasikan infrastruktur menjadi infrastruktur fisik (transportasi, listrik, dsb) dan infrastruktur berhubungan dengan manusia (sekolah, fasilitas kesehatan, dll). Dan menurut Linden et al. (2004), infrastruktur terdiri dari infrastruktur visible (jalan, rel, jembatan, dsb) dan infrastruktur invisible (rute penerbangan, jaringan digital, dll). Pada penelitian ini, karakteristik infrastruktur didefinisikan secara umum.

Guild (1998) menjelaskan bahwa infrastruktur mempunyai peran penting dalam pembangunan. Pertama, infrastruktur dapat menjadi katalis untuk memfasilitasi seluruh elemen pembangunan agar bekerja secara efisien, seperti penggunaan tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas modal pembangunan. Peran kedua, fasilitas infrastruktur itu sendiri merupakan salah satu elemen input dalam pembangunan. Currie (1978) sebagai salah satu peneliti awal tentang kesejahteraan masyarakat, merumuskan bahwa tujuan utama pembangunan termasuk

pengurangan “efek deprivasi” dengan cara mengurangi kesenjangan dalam tingkat konsumsi internasional, dan kontrol yang lebih baik terhadap lingkungan dalam banyak aspeknya, terutama untuk memastikan kelangsungan hidup dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal ini juga didukung oleh Hodge et al. (1995); Imbach et al. (1997); Prescott-Allen (1997). Lebih lanjut, menurut Todaro & Smith (2015), paling tidak terdapat 3 (tiga) komponen utama sebagai basis konsep dan praktis untuk memahami pembangunan, yaitu *sustenance*, *self-esteem*, dan *freedom*. Ketiga komponen ini menjelaskan bahwa pembangunan itu akan menghasilkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, penghargaan terhadap diri manusia itu sendiri, dan kebebasan dalam memilih (memiliki pilihan-pilihan dalam pemenuhan kebutuhan). Selaras dengan hal-hal tersebut, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan-kebutuhan dasar (seperti pangan, rumah, dan kesehatan), meningkatkan level kehidupan (misal pekerjaan/penghasilan yang lebih baik), dan memperluas pilihan-pilihan sosial dan ekonomi.

Mensah (2011) menyatakan bahwa infrastruktur berupa akses transportasi dan listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga di Ghana, sedangkan infrastruktur air tergantung kepada pengeluaran rumah tangga atas fasilitas tersebut dan biaya peluang yang dihadapinya. Penelitian di Papua Nugini membuktikan bahwa perbaikan jalan mengarah pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga, dan dampaknya sedikit lebih tinggi untuk rumah tangga yang kurang beruntung. Rumah tangga yang lebih miskin dan rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah relatif lebih diuntungkan dari jalan yang lebih baik (Wiegand et al., 2017). Penelitian di Merauke dan Boven Digoel juga membuktikan bahwa infrastruktur jalan, infrastruktur transportasi laut dan air, berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur pertanian berupa saluran irigasi, infrastruktur ekonomi berupa pasar tradisional, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur kesehatan memiliki pengaruh yang berbeda atas kesejahteraan masyarakat pada kedua wilayah tersebut (Djanggo et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Annawang, (2019), Marianto (2022), Sagala (2019) juga menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penjelasannya kegiatan infrastruktur dibutuhkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dalam prosesnya akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Belanja Desa untuk infrastruktur meningkat tajam lebih dari sepuluh kali lipat antara tahun 2012 dan 2016. Hal ini menunjukkan sebagian besar Dana Desa dibelanjakan untuk infrastruktur (Bappenas, 2019). Bahkan menurut data Kementerian Keuangan selama periode tahun 2015 sampai dengan 2020, Dana Desa sudah menghasilkan output infrastruktur berupa jalan desa (261.877 km), irigasi (76.463 unit), air bersih (1.281.168 unit), drainase (42.846.367 m), jembatan (1.494.804 m), sarana MCK (422.860 unit), Posyandu (40.618 unit), sumur warga (58.259 unit), pasar desa (11.944 unit), PAUD desa (64.429 kegiatan), sarana olahraga (27.753 unit). Berdasarkan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya, dimana pembangunan infrastruktur dianggap dapat menciptakan kesempatan kerja masyarakat dan dengan bekerja, penghasilan masyarakat akan meningkat sehingga pada akhirnya kesejahteraan akan meningkat pula, maka disusun hipotesis 1 sebagai berikut:

H₁: Pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

Aparatur desa merupakan bagian dari kelembagaan desa, yang menjalankan birokrasi pemerintahan, yang mengatur kegiatan pemerintahan desa, dan yang melakukan kegiatan pelayanan terhadap kebutuhan warga desa. Aparatur desa merupakan aktor utama pelaksanaan Dana Desa. Kinerja aparatur desa menentukan kinerja Dana Desa berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Menurut Emylia & Mildawati (2019), kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat karena kelembagaan dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan agar masyarakat desa dapat mencapai tingkat kemapanan yang diharapkan dan memberikan wewenang kepada masyarakat dalam mengambil keputusan secara profesional. Hasil studi lain menyatakan bahwa kelembagaan atau pelayanan desa ini tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan (Winarsih et al., 2022; Kurniawati & Pangayouw, 2017) karena lembaga masyarakat kampung dinilai tidak kreatif dan kurang inovasi sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat berjalan dengan baik. Seharusnya dengan pelayanan kelembagaan desa yang baik diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penyediaan kegiatan masyarakat serta kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pelayanan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat sudah berjalan sejak lama, bahkan sebelum program Dana Desa hadir, misal melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Terhadap program-program pemberdayaan ini sudah cukup banyak dilakukan penelitian efektivitas program pemberdayaan PNPM tersebut di berbagai wilayah di Indonesia (Fauzana, 2016; Jasuli & Karman, 2013; Nonoy et al., 2017; Putra & Budhi, 2015; Putri & Prabawati, 2016; Rahman, 2021; Robbani, 2017; Romandoni, 2011; Rusman, 2020). Sebagian besar program pemberdayaan PNPM ini berupa mikrokredit atau simpan pinjam untuk menggerakkan usaha dari masyarakat pedesaan. Program pemberdayaan ini dalam berbagai penelitian tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan penghasilan, turut menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan PNPM ini berakhir pada tahun 2014. Dan mulai tahun 2014, program pemberdayaan masyarakat desa merupakan bagian dari implementasi program Dana Desa. Program pemberdayaan masyarakat menggunakan Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan memanfaatkan sumber daya atau bahan baku lokal serta diupayakan dapat menyerap tenaga kerja dari warga desa setempat (Ditjen Perimbangan Keuangan, n.d.). Kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan antara lain berupa pelatihan, bantuan pembiayaan pendidikan, penyuluhan kesehatan, permodalan, bantuan alat produksi, pemberdayaan UMKM dan industri rumah tangga, dan sebagainya (Amin Jaya, 2023). Dalam penelitiannya, Suryawan & Utama (2021) menyimpulkan kegiatan pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan. Adapun program pemberdayaan yang dilaksanakan adalah pemberdayaan UMKM di desa. Rinaldi (2020) juga membuktikan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan simpan pinjam berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan (Rinaldi, 2020; Suryawan & Utama, 2021), penelitian Karnadi (2022) dan Luju et al. (2020b) menyimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan

masyarakat. Kegiatan pemberdayaan akan membentuk masyarakat lebih “berdaya”, misalkan keterampilan meningkat maupun memiliki sumber pembiayaan usaha. Dengan keterampilan yang meningkat dan kepemilikan modal yang cukup, diharapkan penghasilan masyarakat juga meningkat. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjajaki respon dari masyarakat desa di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dari sejak mulainya program Dana Desa sekitar tahun 2014-2015 sampai dengan akhir 2022 tentunya banyak hal yang sudah dirasakan oleh masyarakat desa sebagai pemegang kepentingan utama Dana Desa. Tujuan utama dari program Dana Desa adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera. Penelitian ini bermaksud menggali hal-hal mendukung kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Untuk mencapai tujuan penelitian, studi ini menggunakan instrumen kuesioner kepada masyarakat desa di wilayah Jawa Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan instrumen kuesioner dan juga statistik inferensial. Kuesioner disusun dengan menggunakan format Google Form dan disebarluaskan secara daring melalui berbagai media komunikasi seperti Whatsapp, email, Telegram. Waktu penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan September-Desember 2022. Sebelum disebarluaskan, kuesioner dilakukan uji pendahuluan (*piloting*) untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas kuesioner. Setelah lolos uji validitas dan reliabilitas, kuesioner baru disebarluaskan kepada responden.

Penelitian ini masih dalam tahap eksplorasi untuk menyusun kerangka faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa. Kemiskinan di perdesaan cenderung lebih tinggi daripada angka kemiskinan perkotaan. Sebagai ukuran dari kontra kemiskinan, penting dikaji hal-hal mempengaruhi kesejahteraan. Dana Desa yang digaungkan sejak 2014 memiliki tujuan utama menyejahterakan masyarakat. Dana Desa ini banyak digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, perbaikan kinerja aparat desa, dan terutama diperuntukkan bagi pembangunan fisik sarana dan prasarana di desa.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) variabel laten yaitu kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pelayanan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan variabel endogen, sedangkan pembangunan infrastruktur, pelayanan desa, dan pemberdayaan masyarakat merupakan variabel eksogen. Masing-masing variabel diukur dengan indikator-indikator atau variabel manifest sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan profil data yang dikumpulkan dan digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Data tersebut ditransformasikan dalam bentuk tabulasi seperti rentang data dari angka (nilai) terkecil (minimum) hingga angka terbesar (maksimum). Analisis berikutnya menggambarkan kecenderungan pemusatan data yang merupakan titik pusat atau titik pertengahan. Angka rata-rata tersebut merupakan angka dimana sebagian besar data-data cenderung berada pada posisi di sekitar titik pertengahan. Rata-rata atau *mean* hanya dapat digunakan untuk data rasio, sehingga tidak dapat digunakan untuk data ordinal atau nominal.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

No	Nama Variabel Laten	Indikator/Variabel Manifest (dalam beberapa tahun terakhir terdapat/merasakan:	Rujukan/Referensi
1	Variabel Endogen Kesejahteraan Masyarakat	a. Peningkatan penghasilan b. Tidak merasakan kekurangan kebutuhan pokok c. Memiliki alternatif pilihan dalam memenuhi kebutuhan hidup d. Aspirasi didengarkan e. Makin mudah dalam pengurusan keperluan masyarakat f. Merasa bahagia	Cahyat (2007); Todaro & Smith (2015)
2	Variabel Eksogen Pembangunan infrastruktur	a. Pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi dalam beberapa tahun terakhir b. Pembangunan/perbaikan pasar c. Pembangunan/perbaikan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan d. Pembangunan lapangan/sarana olah raga e. Pembangunan/perbaikan balai pertemuan	Biehl (1991); Jimenez (1994); Guild (1998); Mensah (2011)
	Pelayanan desa	a. Kepala Desa sering silaturahmi ke warga b. Kunjungan warga ke balai desa lebih sering c. Aparat desa terlihat lebih peduli terhadap kondisi masyarakat d. Aparat desa terlihat lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat desa e. Pelayanan di desa semakin cepat, ramah, tidak berbelit-belit	Emylia & Mildawati (2019); Winarsih et al., 2022
	Pemberdayaan masyarakat	a. Bantuan alat-alat pertanian b. Bantuan benih/bibit tanaman c. Bantuan biaya pendidikan d. Bantuan ekonomi (sembako) e. Kegiatan-kegiatan pelatihan f. Kegiatan penyuluhan kesehatan	Suryawan & Utama (2021); Rinaldi (2020); Amin Jaya (2023)

Sumber: Diolah penulis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan profil data yang dikumpulkan dan digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Data tersebut ditransformasikan dalam bentuk tabulasi seperti rentang data dari angka (nilai) terkecil (minimum) hingga angka terbesar (maksimum). Analisis berikutnya menggambarkan kecenderungan pemusatan data yang merupakan titik pusat atau titik pertengahan. Angka rata-rata tersebut merupakan angka dimana sebagian besar data-data cenderung berada pada posisi di sekitar titik pertengahan. Rata-rata atau *mean* hanya dapat digunakan untuk data rasio, sehingga tidak dapat digunakan untuk data ordinal atau nominal.

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2009). Sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan maka dalam penelitian ini analisis data statistik inferensial menggunakan model persamaan struktural (*Structural Equation Modelling/SEM*). Penggunaan SEM ini diyakini sebagai metode yang mengatasi kelemahan jika analisis data menggunakan analisis regresi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *variance-based SEM* atau dikenal dengan sebutan *Partial Least Square (PLS)*. Penelitian ini menggunakan model indikator reflektif dengan pertimbangan bahwa hubungan indikator dengan variabel latennya adalah independen, artinya variabel laten (konstruk) tidak dibentuk oleh indikator melainkan indikator merefleksikan variabel latennya. Pengurangan atau penambahan indikator tidak akan mengubah konseptual domain variabel laten (konstruk) dan antar indikator memiliki korelasi yang tinggi dan positif ketika diuji dengan *factor loading*, *composite reliability* dan *average variance extracted (AVE)* (Ghozali & Latan, 2015).

PLS menggunakan dua jenis pengukuran model yaitu *outer model* dan *inner model*. *Outer model* adalah bagaimana hubungan antara variabel manifest atau indikator dengan variabel latennya. Variabel laten adalah variabel yang tidak terukur secara langsung sehingga disebut juga dengan *unobserved variable*, *factor*, konstruk dan disebut juga dengan istilah sebagai variabel fenomena abstrak. Variabel manifest atau indikator tersebut diukur secara langsung maka disebut juga dengan istilah *observed variable* atau variabel terobservasi, variabel manifest, indikator atau referensi. Model pengukuran (*outer model*) digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrumen. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper & Schindler, 2014).

4. Hasil dan Pembahasan

Populasi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat atau penduduk desa di wilayah Provinsi Jawa Timur. Profil responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Profil Responden

Jenis Kelamin		Usia	
Laki-laki	144	15 s.d. 30 tahun	148
Perempuan	147	30 s.d. 45 tahun	49
		di atas 45 tahun	94
Pekerjaan		Pendidikan	
ASN/TNI/POLRI	40	SD/SMP/setara	40
Wiraswasta	32	SMA/D1	125
Karyawan/Buruh	47	D3	29
Petani	21	D4/S1	88
Pelajar/Mahasiswa	99	S2/S3	9
Lainnya	52		

Sumber: diolah dari kuesioner

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa responden laki-laki dan perempuan cukup seimbang jumlahnya. Jika ditinjau dari sisi usia, responden didominasi oleh kelompok usia muda (15 sampai dengan 30 tahun). Jika ditinjau dari sisi pekerjaan atau profesi responden, kelompok petani sangat sedikit, karyawan/buruh serta pelajar yang cukup banyak. Sebagian besar responden kelompok usia muda adalah pelajar/mahasiswa. Untuk pekerjaan lainnya, diisi cukup beragam oleh responden, dari profesi guru honorer sampai dengan ibu rumah tangga. Dominasi level pendidikan responden adalah SMA/D1, diikuti dengan kelompok lulusan D4/Sarjana. Akan tetapi masih ada juga yang masih lulusan SD dan sedikit yang berpendidikan S2/S3. Beragamnya pekerjaan/profesi maupun pendidikan responden, menggambarkan kondisi desa masa kini bahwa desa itu tidak lagi didominasi oleh masyarakat yang fokus pada sektor pertanian/agraris. Sektor pertanian bukan lagi sektor penyokong perekonomian desa di Jawa Timur. Sebaran responden ini cukup relevan dengan data dinamis perekonomian Jawa Timur. Pada tahun 2021, Jawa Timur melaporkan bahwa dengan jumlah penduduk kurang lebih 40 juta, dominasi penduduk didominasi penduduk dengan usia 8-23 tahun dan usia 24-39 tahun, yang merupakan gen Z dan milenial. Dari perkembangan perekonomiannya, Jawa Timur melaporkan bahwa distribusi pertumbuhan tertinggi ada pada sektor industri pengolahan. Sektor pertanian hanya menyumbang 10% dari pertumbuhan ekonomi (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2021).

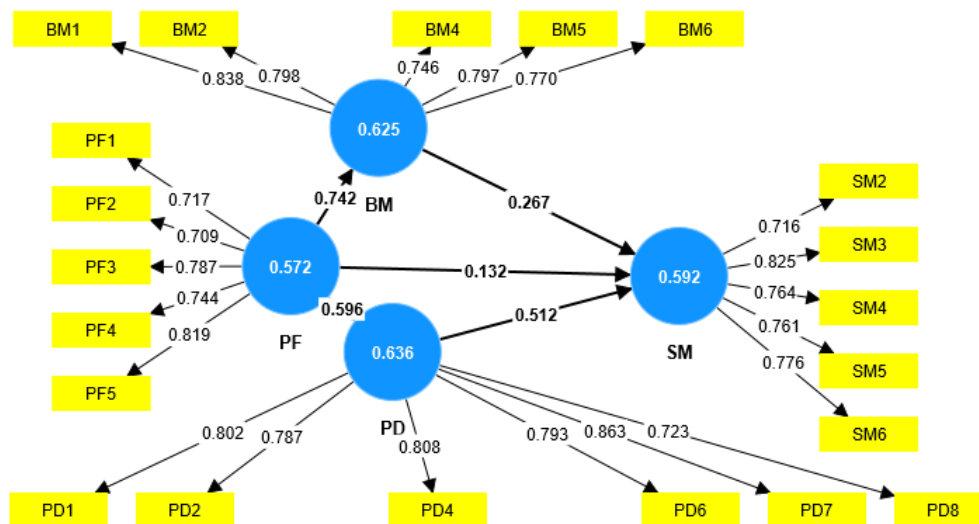
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersifat *cross-section* dimana metode pengolahan data mengaplikasikan model persamaan struktural (*structural equation modelling/SEM*). Penggunaan SEM ini diyakini sebagai metode yang mengatasi kelemahan metode regresi seperti terbatasnya pengujian untuk *path analysis*, analisis komponen prinsip dan penggunaan *multivariable* dependen dalam sekali pengujian. SEM juga memiliki keunggulan yaitu kemampuan mengukur variabel laten yang tidak secara langsung diukur tetapi melalui estimasi indikator atau parameternya (Abdillah & Jogiyanto, 2015). Penggunaan PLS yang menerapkan prosedur *bootstrapping* atau penggandaan secara acak sehingga asumsi normalitas dan multikolinearitas tidak menjadi masalah dalam analisis data. Di samping itu PLS tidak mengasumsikan data tertentu, dapat berupa data nominal, kategori, interval maupun rasio. Penelitian ini menggunakan model indikator reflektif untuk membangun variabel konstruk/laten dimana indikator atau manifes merefleksikan dari variabel laten. Konstruk reflektif diukur dengan menggunakan indikator-indikator manifestasinya. Model indikator reflektif mengasumsikan bahwa kovarian di antara pengukuran dijelaskan oleh varian yang merupakan manifestasi dari konstruk latennya. Indikator merupakan indikator efek dimana arah kausalitas dari konstruk ke indikator pengukuran sehingga konstruk menjelaskan varian pengukurannya (Abdillah & Jogiyanto, 2015).

Pada saat melakukan evaluasi terhadap *outer model* final, pengujian model pengukuran berikutnya adalah validitas konstruk lainnya yang diukur dengan *Average Variance Extracted* (AVE) dan *composite reliability* konstruk atau variabel laten dari pemberdayaan masyarakat, pelayanan aparatur, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat dengan *composite reliability* > 0,60 serta indikator AVE > 0,50 sebagaimana disajikan pada Tabel 3. berikut ini.

Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Laten

Variabel	Cronbach's alpha	rho_a	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
BM	0,850	0,852	0,893	0,625
PD	0,885	0,888	0,913	0,636
PF	0,812	0,820	0,870	0,572
SM	0,827	0,832	0,878	0,592

Sumber: Diolah dari SMART-PLS



Gambar 1 Output Outer Model Final

Evaluasi terhadap model struktural atau *inner model* dilakukan terhadap potensi korelasi antar variabel dan kesesuaian model (*goodness of fit*). Korelasi antar variabel independent tidak terjadi, ditunjukkan dengan indicator VIF di bawah 5,0 atau di bawah 10,0. Sementara, kesesuaian model diperlihatkan dengan SRMR 0,089 (di bawah 0,10) dan NFI 0,728 (di bawah 0,90). Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4 berikut. Variabel pemberdayaan masyarakat, pelayanan aparatur, dan pembangunan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
BM -> SM	0,267	0,269	0,068	3,936	0,000***
PD -> SM	0,512	0,511	0,062	8,262	0,000***
PF -> BM	0,742	0,743	0,032	23,176	0,000***
PF -> PD	0,596	0,598	0,043	13,754	0,000***
PF -> SM	0,132	0,131	0,064	2,071	0,038**

R Square = 0,645

Adjusted R Square = 0,641

SRMR = 0,089

NFI = 0,728

Signifikan pada α = 1% ***, 5%**

Keterangan: (SM=Kesejahteraan Masyarakat; PF=Pembangunan Infrastruktur; PD=Pelayanan Aparatur Desa; BM=Pemberdayaan Masyarakat)

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan model struktural menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Annawang, 2019; Djanggo et al., 2019; Marianto, 2022; Mensah, 2011; Sagala, 2019; Wiegand et al., 2017). Infrastruktur merupakan tulang punggung pada berbagai negara dan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Infrastruktur di pedesaan krusial perannya untuk pertanian, agro-industri, dan penurunan kemiskinan pedesaan. Infrastruktur pedesaan menyediakan kondisi produksi penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sosial dan ekonomi dan untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah pedesaan (TriumphIAS, 2021). Pembangunan infrastruktur dalam hal ini mencakup pembangunan jalan, listrik, perumahan, air bersih dan sanitasi, sarana dan prasarana komunikasi, fasilitas kesehatan, pasar desa, dan pembangunan fisik lain yang ada di desa.

Menggunakan kerangka analitis, Ali & Pernia (2003) menjelaskan bahwa investasi atas infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui area-area yang diintervensi, misal dengan intervensi melalui pembangunan jalan, irigasi, dan listrik maka akan mempengaruhi area produktivitas pertanian, produktivitas non-pertanian, dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap perolehan gaji dan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat miskin, dan berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi pedesaan. Selanjutnya hal tersebut dapat memicu kenaikan penghasilan/konsumsi masyarakat miskin dan ketersediaan dan jaminan harga terjangkau dari barang-barang kebutuhan dasar, yang pada akhirnya masyarakat merasakan kesejahteraan secara ekonomi dan penurunan kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat dirasakan utamanya secara ekonomi, yaitu mengalami peningkatan penghasilan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Peningkatan penghasilan dan tercukupinya kebutuhan hidup dapat terwujud karena aktivitas ekonomi berjalan dengan baik. Kelancaran aktivitas ekonomi ini berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur di desa. Chaurey & Trung Le (2019) membuktikan bahwa program infrastruktur pedesaan di negara berkembang mungkin merupakan cara yang hemat biaya untuk menghasilkan lapangan kerja, terutama di entitas skala kecil.

Pelayanan desa sebagai bagian dari kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi jika dianalisis lebih lanjut dari pengaruh secara langsung, koefisien pengaruhnya lebih kecil daripada jika melalui variabel pemberdayaan masyarakat maupun variabel pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan perlu penguatan faktor lain agar pelayanan desa ini dapat memberikan peningkatan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Emylia & Mildawati (2019) dan berbeda dengan penelitian (Kurniawati & Pangayouw, 2017; Winarsih et al., 2022). Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kepala desa dan aparatur desa perlu menjalankan perannya sebagai stabilisator, innovator, pelopor, dan modernisator. Sebagai stabilisator kepala desa beserta perangkatnya harus menjaga kestabilan kondisi di desa, hambatan dan dinamika dapat selaras dengan kehidupan masyarakat, dan tercipta kerukunan dan rasa aman dalam masyarakat. Peran sebagai innovator akan menempatkan kepala desa dan perangkatnya untuk terus melakukan pembaruan ke arah yang lebih baik atau perbaikan yang terus menerus, sehingga dapat menciptakan peluang-peluang baru bagi kesejahteraan masyarakat. Peran pelopor akan

memposisikan kepala desa dan perangkat desa pada posisi terdepan yang memberikan teladan bagi seluruh elemen masyarakat, selalu terdepan dalam melayani masyarakat. Dengan menjadi modernisator, kepala desa dan perangkatnya akan mewujudkan pemerintahan dan pelayanan yang modern serta efisien dalam mewujudkan tujuan pembangunan (Siagian, 2009).

Faktor pelayanan ini juga sangat erat kaitannya dengan *good governance*. Prinsip *good governance* yang harus diimplementasikan oleh perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di antaranya pemerintah desa melaksanakan kewajiban berdasarkan pada peraturan yang berlaku, pemberian akses informasi yang dibutuhkan oleh warga desa dan pihak berkepentingan lainnya secara mudah dan transparan, adanya partisipasi masyarakat dan perwujudan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat (Amorodito et al., 2022). Hambatan yang umumnya dihadapi dalam penerapan *good governance* pengelolaan dana desa ini adalah kurangnya sumber daya yang berkualitas, hambatan komunikasi dengan masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan desa banyak yang tidak tersampaikan kepada masyarakat, dan tidak tersedianya media informasi sebagai bentuk transparansi kegiatan kepada masyarakat (Dewi et al., 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rinaldi (2020), Suryawan & Utama (2021). Keberhasilan program pemberdayaan ini dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi diartikan sebagai kemampuan para pemangku kepentingan dalam memberikan informasi yang jelas dan konsisten. Faktor sumber daya merupakan perwujudan kemampuan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh kelompok pemberdayaan dan usaha ekonomi. Disposisi menggambarkan peran pemimpin/pendamping kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya. Struktur birokrasi adalah kemampuan pelaksana untuk mengelola kegiatan sesuai tugas dan fungsinya (Daraba, 2015). Wastiti et al. (2021) menekankan faktor kemauan masyarakat itu sendiri dalam mendukung keberhasilan program yang melibatkan masyarakat. Isyanto (2017) menambahkan bahwa faktor pendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah semangat atau motivasi dari para pelaku pemberdayaan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Faktor yang dapat menghambat antara lain kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya kegiatan pemberdayaan serta kurangnya pendukung sarana dan prasarana yang memadai.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur, pelayanan desa, dan pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari ketiga variabel yang diteliti, variabel pelayanan desa memberikan pengaruh langsung paling kecil dibandingkan dengan variabel yang lain. Aspek pelayanan yang mengacu kepada konsep *good governance* masih sangat perlu ditingkatkan agar memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemberian pelayanan secara akuntabel dan transparan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini adalah mendorong agar sumber daya di desa dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan dan infrastruktur, serta perbaikan dalam pelayanan kepada masyarakat desa.

Penelitian ini tidak mengkaji pengaruh Dana Desa terhadap kegiatan pembangunan desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan kelembagaan desa secara khusus. Akan tetapi penelitian ini mengkaji secara umum perubahan yang dirasakan masyarakat dalam kesejahteraan dalam kurun waktu terakhir. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan variabel moderasi berupa peningkatan aktivitas ekonomi untuk memperkuat pengaruh infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel moderasi kepercayaan publik atau akuntabilitas juga dapat ditambahkan untuk memperkuat hubungan variabel pelayanan aparatur dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga dapat dimasukkan variabel kontrol dari demografi responden.

Daftar Pustaka

- Abdillah, W., & Jogiyanto. (2015). *Partial Least Square (Pls) Alternatif Structural Equation Modeling (Sem) Dalam Penelitian Bisnis*. Andi.
- Agustina, R. (2022). *Pemanfaatan dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat (Studi pada Desa Tewah Pupuh Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur)*. Universitas Lambung Mangkurat.
- Ali, I., & Pernia, E. M. (2003). *Infrastructure and poverty reduction - What Is the connection?* Asian Development Bank
- Amin Jaya. (2023). *Program pemberdayaan masyarakat desa*. <https://Aminjaya.Desa.Id/Page/Detail/Program-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa>.
- Amorodito, R. D., Lestari, P., Maghfiroh, S., & Apriyani, L. (2022). Prinsip good governance dalam pengelolaan penggunaan dana desa dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Conference: "Rural Tourism and Creative Economy to Develop Sustainable Wellness."
- Annawang, L. K. (2019). *Pengaruh pembangunan infrastruktur perdesaan berbasis partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat desa*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Annisa, N. (2021). *Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa Bontokaddopepe Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. Universitas Muhammadiyah.
- Ardiansyah, Syukri, M., Sari, I., & Nurjannah. (2022). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 85-103.
- Bappenas. (2019). *Mewujudkan infrastruktur perdesaan yang berkualitas dengan dana desa: Catatan kebijakan UU Desa*.
- Biehl, D. (1991). The role of infrastructure in Regional Development. In Vickerman, R.W. (Ed.), *Infrastructure and Regional Development*, 9–35.
- Bili, S. R., & Ra'is, D. U. (2017). Dampak dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(3), 38-45. DOI: <https://doi.org/10.33366/jisip.v6i3.1457>
- Cahyat, A., Gönner, C., & Haug, M. (2007). *Mengkaji kemiskinan dan kesejahteraan rumah tangga: Sebuah panduan dengan contoh dari Kutai Barat, Indonesia* (No. 121p).

- Chaurey, R., & Trung Le, D. (2019). *Rural Infrastructure Development and Economic Activity*.
- Cooper, D., & Schindler, P. (2014). *Business Research Method*. McGraw Hill.
- Currie, L. (1978). The objective of development. *World Development*, 6(1).
- Damayanti, E. (2022). *Pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastrur di Desa Baruga Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Daraba, D. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan. *Sosiohumaniora*, 17(2), 165-169.: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i2.7305>
- Daud, N. R., Bumulo, F., & Hasiru, R. (2022). Pengaruh kebijakan dana desa terhadap pembangunan Desa Mutiara. *Oikos-Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 43-52.
- Deaton, A. (1980). *Measurement Of Welfare: Theory and Practical Guidelines (English). Living Standards Measurement Study (Lsms)*.
- Dewi, A. N., Gunawan, W., & Sutisna, J. (2021). Penerapan prinsip good governance di Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka (Studi pada pengelolaan dana desa di Desa Sindanghaji tahun 2019). *Janitra*, 1(1), 40-54
- Ditjen Perimbangan Keuangan. (N.D.). *Bagaimana penggunaan dana desa*. <https://Djpk.Kemenkeu.Go.Id/?Ufaq=Bagaimana-Penggunaan-Dana-Desa>.
- Django, R. T. P. M., Tamberan, Y. W., Tawakal, M. A., & Unde, A. A. (2019). Analysis of infrastructure and community welfare in Merauke district and Boven Digoel district. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.
- Emyilia, L., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa, kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(6), 1-18.
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(3), 41-57.
- Fauzana, F. (2016). *Dampak program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pohgading Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tahun 2007-2014*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ferdinandus, A. Y. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pelaksanaan program pembangunan desa pada Kampung Maladuk Distrik Klasafet Kabupaten Sorong. *Jurnal El-Riyasah*, 10(2), 156-169.
- Firmansyah, D., Susetyo, D. P., & Sumira, M. (2020). Dampak dana desa terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 3(2), 168-181.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guild, R. L. (1998). *Infrastructure Investment and Regional Development: Theory and Evidence* (No. 98; 3).

- Haerunnisa, A. (2022). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Moderasi Perangkat Desa Di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone*. Universitas Muhammadiyah.
- Halim, S. K., & Aras, M. (2016). Pengaruh faktor dana terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Indragiri Hilir (Studi kasus pedesaan). *Selodang Mayang: Jurnal Bappeda*, 2(3), 134-141.
- Hodge, T., Holtz, S., Smith, C., & Baxter, K. H. (1995). Pathways to sustainability: Assessing our progress. *Nrtee*.
- Imbach, A., Dudley, E., Ortiz, N., & Sánchez, H. (1997). *Mapeo Analítico, Reflexivo Y Participativo De La Sostenibilidad – Marps*.
- Iryani, D. (2022). *Pengaruh efektivitas penggunaan dana desa terhadap peningkatan pelayanan masyarakat dalam perspektif Islam (Studi pada Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Isyanto, P. T. (2017). *Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan badan usaha milik desa (Bum Desa) di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- 'Izazi, Z. S. (2023, January 14). *Dampak pengaruh pemanfaatan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa*. Jurnal Post.
- Jasuli, D., & Karman. (2013). Efektifitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi dampak tentang pelaksanaan Pnpm-Mp di Desa Pakandangan Baratkecamatan Bluto Kabupaten Sumenep). *Jurnal Ilmiah Mitsui*, 1(2) DOI: <https://doi.org/10.24929/ft.v1i2.56>.
- Jimenez, E. (1994). *Human And Physical Infrastructure: Public Investment and Pricing Policies In Developing Countries* (Policy Research Working Paper 1281).
- Karnadi. (2022). *Pengaruh pemberdayaan masyarakat, peran tokoh dan pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir melalui modal sosial di Kabupaten Situbondo*. Universitas Jember.
- Kurniawan. (2021). Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 23(3), 513-522.
- Kurniawati, Y., & Pangayouw, B. (2017). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana kampung, kebijakan kampung dan kelembagaan kampung terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 12(2), 77-87.
- Laila, H. (2021). *Pengaruh penggunaan dana desa, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagari Pasilihan*. Institut Agama Islam Negeri.
- Linden, G., Ike, P., & Voogd, H. (2004). Issues in environmental and infrastructure planning. *Geo Press*, 11-35.
- Luju, E., Wisang, I. V., Wulandari, C. A., & Poin, E. A. (2020). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. *Jurnal Ilmiah Projemen*, 7(1), 37-55.
- Marfuah, A. (2000). Kemiskinan dan kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 35-46.
- Marianto. (2022). *Pengaruh infrastruktur terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*. Universitas Muhammadiyah Palopo.

- Mendrofa, S. A. (2021). Dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa Hiliwa'ele Ii Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(4), 1036-1047. DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v9i4.37007>
- Mensah, E. (2011). *Infrastructure access and household welfare in rural Ghana: The empirics of the nexus*. Erasmus Mundus International Master of Science In Rural Development.
- Nadia, E. (2021). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat*. Universitas Muhammadiyah.
- Nasution, I., Badaruddin, & Lindawati. (2022). Pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 22(2), 200-213.
- Ngera, E. F., Djata, B. T., & Luciany, Y. P. (2021). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan desa tahun 2018-2020 di Desa Fatamari Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende. *Jurnal Equilibrium*, 2(1), 66-72.
- Nonoy, A., Ruauw, E., & Kumaat, R. (2017). Dampak program nasional pemberdayaan masyarakat (Pnpm) mandiri perdesaan terhadap pendapatan petani desa paslaten, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan. *Agri-Sosioekonomi*, 13(1a), 41-54. DOI: <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.1A.2017.14952>
- Nuwa, C. A. W., Luju, E., Wisang, I. V., & Fatima, T. A. (2023). Pengaruh pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Ilin Medo Kecamatan Waiblama. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (Msej)*, 4(2), 705-713. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i2.1227>
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2021). *Data Dinamis Perekonomian Jawa Timur*.
- Perangin-Angin, E. A. (2017). *Pengaruh dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungu*. Universitas Medan Area.
- Prescott-Allen, R. (1997). *Barometer of sustainability: Measuring and communicating wellbeing and sustainable development*. <http://hdl.handle.net/10625/54761>
- Putra, I. G. P., & Budhi, M. K. S. (2015). Efektivitas dan dampak program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (Pnpm-Mpd) terhadap peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja rumah tangga sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(3), 183-196
- Putri, D. N., & Prabawati, I. (2016). Dampak program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM MPD) (Studi tentang program simpan pinjam perempuan (Spp) di Dusun Wedani Desa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik). *Publika: E-Journal Unesa* 4 (10),. DOI: <https://doi.org/10.26740/publika.v4n10.p%25p>
- Rahman, R. (2021). *Pengaruh program PNPM Mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ramadhani, S. W., Murodi, A., & Muljono, H. (2019). Pengaruh efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(2). DOI: <https://doi.org/10.33592/jiia.v9i2.267>

- Ramaza, D. R. (2022). *Dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan*. Uin Ar-Raniry.
- Ravallion, M. (2016). Measuring welfare. In *The economics of poverty: History, measurement, and policy* (Pp. 131–190).
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Rinaldi. (2020). *Pengaruh pemberdayaan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif islam (Studi pada lembaga distribusi pangan masyarakat desa Namploh Papeun Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Robbani, A. (2017). *Dampak simpan pinjam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif muamalat (Studi kasus pada unit pengelola kegiatan mekar mandiri di simpan pinjam perempuan (Spp) Desa Babakan Jati Kecamatan Cigandamekar)*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon.
- Romandoni, S. (2011). *Implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan dalam pemberian kredit mikro dan perannya terhadap program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Winong Kabupaten Pati periode 2009*. Universitas Negeri Semarang.
- Rusman. (2020). Evaluasi dampak implementasi PNPM-Mandiri perdesaan terhadap tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 13(01), 147-163.
- Sagala, Z. A. (2019). *Pengaruh pembangunan infrastruktur jalan dan sumber daya alam terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Kurniawan, K. (2021). Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 23(3), 513–522.
- Siagian, S. P. (2009). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Suryawan, A., & Utama, M. S. (2021). Pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap community based tourism dan kesejahteraan masyarakat pada Ceking Rice Terrace, Tegallalang. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(8), 674-680. DOI: <https://doi.org/10.24843/EEB.2021.v10.i08.p03>
- Suwaji, & Suharmiyati. (2020). Analisis dampak implementasi dana desa dan alokasi dana desa terhadap tata kelola pemerintahan, kualitas layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat desa (Studi pada desa di Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau). *J-Mas: Jurnal Manajemen Dan Sains*, 5(1), 20-26. DOI 10.33087/jmas.v5i1.143
- Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V. J., & Mirah, A. D. P. (2017). Dampak program dana desa terhadap peningkatan pembangunan dan ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosio Ekonomi* 13(2A), 335-342. DOI: <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2A.2017.17130>
- Tobing, A. L., Simangunsong, R., & Siagian, N. (2021). Pengaruh dana desa terhadap pembangunan desa di Kecamatan Siantar Narumonda melalui pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 916-924. DOI: <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.369>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th Ed.). Pearson Education.

- Triumphias. (2021, May 18). *Importance of Infrastructure in rural development*.
- Wastiti, A., Purnaweni, H., & Rahman, A. Z. (2021). Faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review* 10(4). DOI: 10.14710/jppmr.v10i4.32126
- Wiegand, M., Koomen, E., Pradhan, M., & Edmonds, C. (2017). *The impact of road development on household welfare in rural Papua New Guinea*.
- Winarsih, T., Subhan, M., & Nengsih, T. A. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Desa Rantau Kembang Kabupaten Tebo tahun 2018 – 2020. *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 142-157.
- Yanti, M. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi (Studi kasus pada Desa Sudajaya Girang APBDES tahun 2016-2019). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi STIE Pasim Sukabumi*, 2(2), 68-88.